

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TA 2025



DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2025. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang akan terus berupaya menyempurnakan strategi dan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penyajian LKJIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan urusan pangan dan perikanan di wilayah Kabupaten Jombang.

Jombang, Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan



Drs. BAMBANG SRIYADI, M.Si
NIP 196807091989031007

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 2025, yaitu: (1) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, (2) Meningkatnya produksi perikanan dan (3) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif.

Tolak ukur capaian sasaran strategis pertama “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan indikator ***Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan***. Pola Pangan Harapan merupakan sebuah parameter untuk mengetahui/ memantau bagaimana kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia sehingga setiap tahun perlu dilakukan survey konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan dan ketersediaan pangan. Target Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi tahun 2025 sebesar 91,28 dan realisasi tercapai 91,30 (100,2%), Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan tahun 2025 sebesar 70,84 dan realisasi tercapai 71,02 (100,25%), realisasi Skor Pola Pangan Harapan melebihi target artinya sudah terdapat keragaman konsumsi pangan meskipun demikian dari hasil survey Skor PPH pada 9 (sembilan) kelompok pangan penyumbang energi terbesar adalah kelompok padi-padian sehingga secara umum masyarakat Kabupaten Jombang dalam pemilihan menu makanan pokok masih cenderung memilih mengkonsumsi beras sedangkan untuk proporsi konsumsi umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah masih kurang ideal karena jauh dibawah skor maksimal.

Tolak ukur capaian sasaran strategis kedua “Meningkatnya Produksi
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang

target sebesar 0,21 % dapat terealisasi sebesar 0,21 %. Pertumbuhan produksi ikan tahun 2025 berhasil naik, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 1%.

Tolak ukur capaian sasaran strategis ketiga yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif” dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**. Indeks RB Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025 yang terealisasi sebesar 81,47 (A) dari target 79,39 (BB) dengan kategori **Memuaskan** (Nilai Angka 80-90).

Upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dilakukan melalui realisasi 8 (sembilan) indikator kinerja program pada Renja tahun 2025, antara lain: (1) Pertumbuhan Lumbung Pangan yang Aktif 0,372% (capaian 100%), kegiatan penyisihan cadangan pangan sudah dilaksanakan oleh kelompok lumbung, (2) Persentase unit kelompok masyarakat dan pelajar/sekolah yang melakukan diversifikasi pangan (100%), (3) Persentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dengan realisasi 100% (capaian 100%), sudah dilakukan pembinaan pada desa tahan pangan, (4) Persentase sampel uji yang aman dengan realisasi 98,81% (capaian 100%) (5) Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap dengan realisasi 0,13 % (92,86%), (6) Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya dengan realisasi 0,21% (100%), (7) Angka Konsumsi Ikan dengan realisasi 43,83 (100%) dan Persentase pertumbuhan nilai produksi hasil olahan perikanan dengan realisasi 0,4% (100%) (8) Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah dengan realisasi 99,01%.

Penghargaan yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang antara lain Penghargaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang Berperan Aktif dalam peningkatan konsumsi ikan di daerah dan Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik, Tingkat Kabupaten Jombang.

Pada tahun 2025, pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 9.363.505.416,-, anggaran tersebut merupakan anggaran perubahan dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.455.583.315,-

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang

(90,30%). Belum maksimalnya serapan anggaran disebabkan antara lain adanya kegagalan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk keluarga resiko stunting dikarenakan persyaratan administrasi yang tidak sesuai. Serta adanya efisien anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan capaian kinerja hampir sebagian besar terealisasi sesuai target, ada beberapa indikator yang belum terealisasi sesuai target yaitu persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap, hal ini dikarenakan masih tingginya penangkapan ikan pada perairan umum darat secara destruktif.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui evaluasi program kegiatan yang terdapat kegagalan sehingga dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan seperti mengoptimalkan persyaratan administrasi pelaksanaan kegiatan, perbaikan usulan Standart Satuan Harga sehingga tidak ada silpa yang besar, mengoptimalkan kegiatan restocking sebagai salah satu upaya pengembalian ekosistem perairan umum darat serta peningkatan kolaborasi Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang berada di sekitar perairan umum darat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1 Struktur Organisasi	1
1. 2 Tugas dan Fungsi	2
1. 3 Isu Strategis	3
1. 4 Cascading Kinerja	4
1.5 Peta Proses Bisnis	5
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	5
1.7 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	50
C. Upaya Perbaikan Kinerja	67
BAB IV. PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	15
2.2 Perjanjian Kineja.....	17
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	19
3.1 Pencapaian Kinerja	21
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	28
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	34
3.1.4 Perbandingan Realissai Kinerja dengan Realisasi Nasional	37
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran.....	51
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
3.2.3 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai	58
3.2.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	61
3.2.5 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	62
3.2.6 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja

BAB I

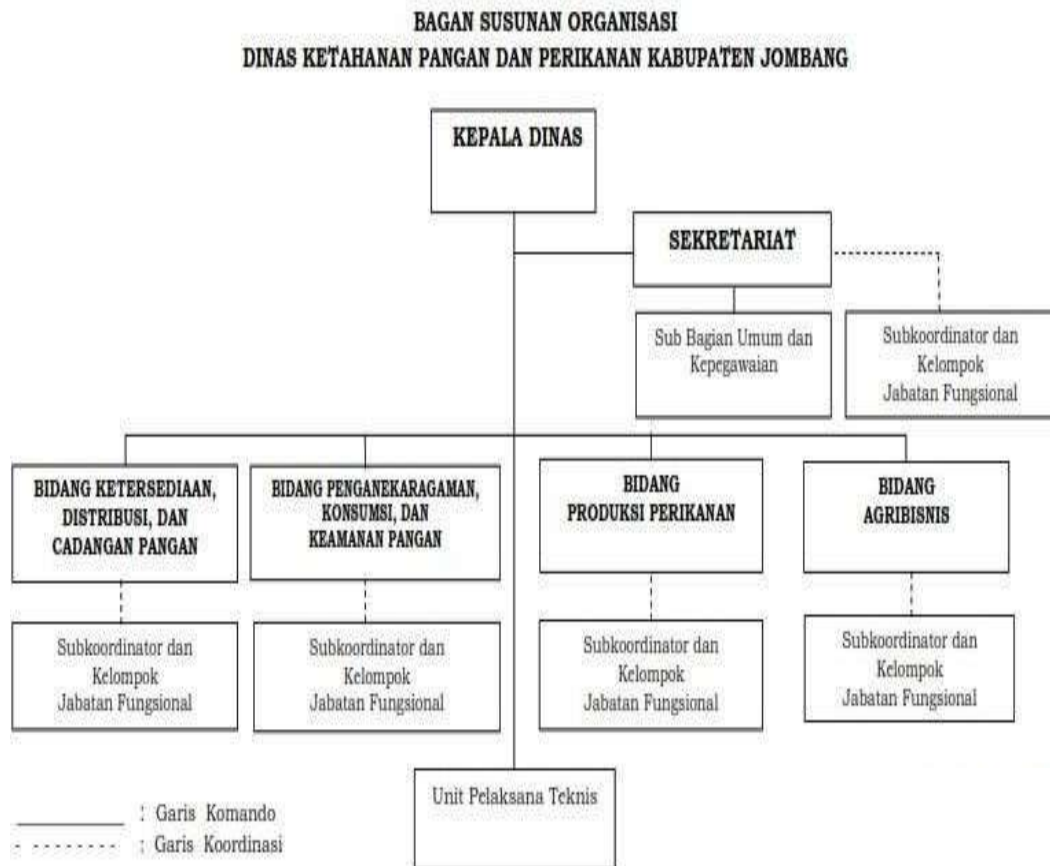
PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, berkoordinasi dengan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan, berkoordinasi dengan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, berkoordinasi dengan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Produksi Perikanan, berkoordinasi dengan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Agribisnis, berkoordinasi dengan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang maka dapat digambarkan susunan/struktur organisasi Dinas sebagai berikut :



1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pangan dan bidang perikanan.

Selain menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang dalam pembangunan di bidang pangan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

Urusan Pangan

- 1. Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat sesuai potensi local wilayah
- 2. Peningkatan system informasi dan logistic pangan daerah yang *up to date*, cepat dan terstandar
- 3. Masih rendahnya panganekaragaman serta diversifikasi konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal

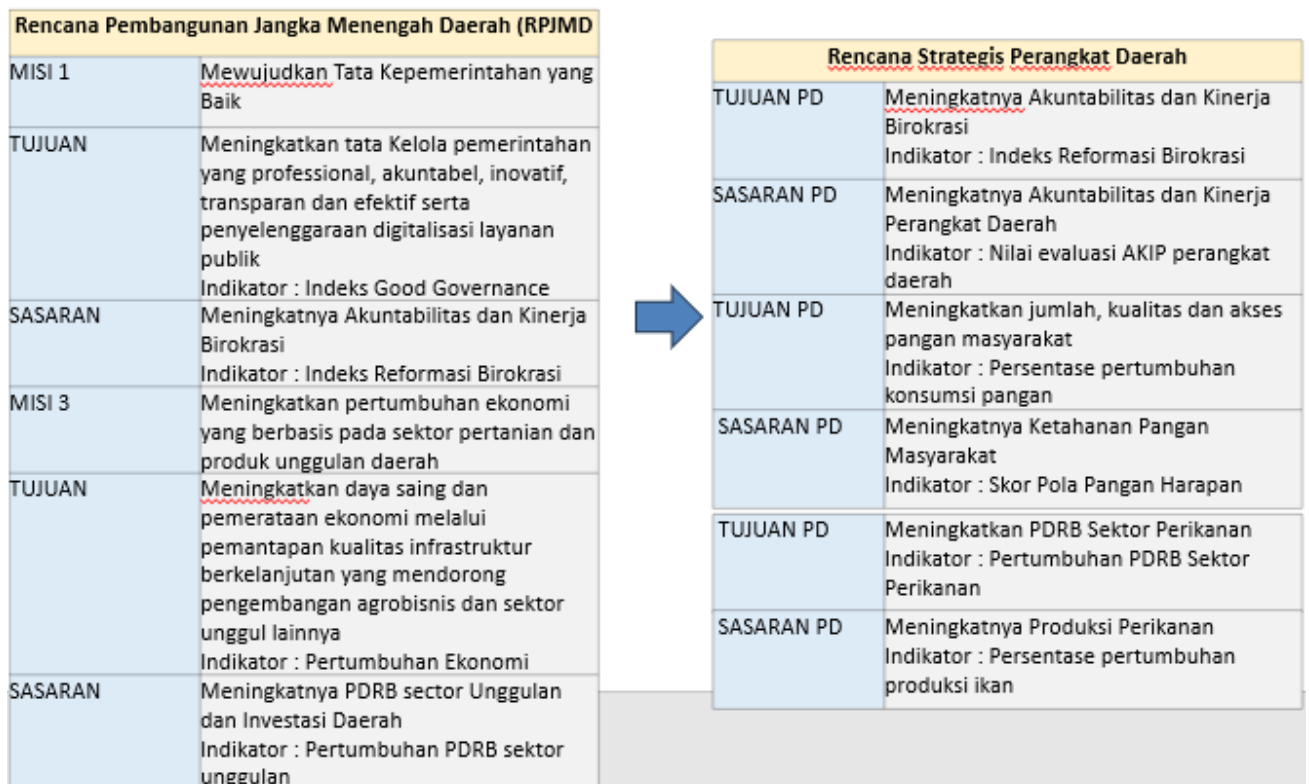
Urusan Perikanan

- 1. Masih rendahnya produksi perikanan (budidaya dan tangkap)
- 2. Menurunnya kualitas Perairan Umum Daratan (PUD)
- 3. Rendahnya peningkatan kelas kelompok perikanan
- 4. Daya saing produk olahan, pemasaran olahan hasil dan konsumsi ikan masih rendah

1.4 Cascading Kinerja

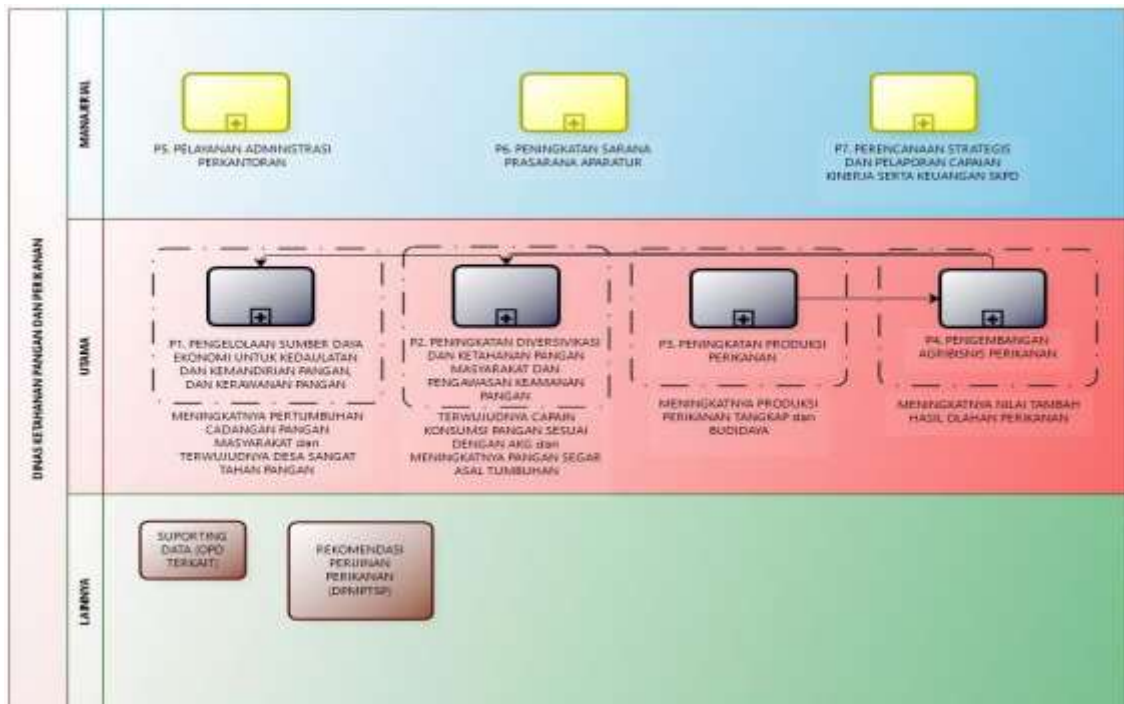
Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Jombang 2024-2026 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah mendukung pada Misi Ke-1 dan Misi ke-3 (tiga) yaitu *“Mengembangkan Tata Pemerintahan yang Baik”* dan *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Sektor Pertanian dan Produk Unggulan Daerah”*.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung sasaran RPD yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi serta Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah*, yang diselaraskan dengan *Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan*. Adapun keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :



1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis agar supaya terdapat kejelasan dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anatar unit kerja internal Dinas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk proses bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara detil tersaji pada Dokumen Probis OPD sedangkan proses bisnis utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersaji sebagai berikut :



1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

1.6.1 Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Nomor : X.700/522/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah 80,37% dengan kategori A (Memuaskan) yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan pada seluruh jenjang. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau dengan formulasi perhitungan per komponen sebesar 80% nilai LKE dan 20% hasil evaluasi lapangan, adapun gambaran hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 22,26 dari bobot 30% atau dengan capaian 80,86% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.
- b. Evaluasi atas Pengukuran kinerja;
Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,29 dari bobot 30% atau dengan capaian 77,62% (B) yang berarti bahwa kualitas kinerja sebagian besar telah terpenuhi (>75% - 100%) sesuai mandat kebijakan.
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 12,64 dari bobot 15% atau dengan capaian 84,29% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria yang telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 20,19 dari bobot 25% atau dengan capaian 80,75% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Dalam menetapkan target kinerja untuk periode selanjutnya agar

- memperhatikan basis data atas capaian kinerja periode sebelumnya;
- b. Melakukan monitoring atas target jangka menengah dalam rencana strategis sampai dengan level kegiatan dan sub kegiatan serta menindaklanjuti hasil monitoring dalam langkah nyata;
 - c. Meningkatkan pemahaman pegawai dengan melibatkan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pegawai agar lebih memperhatikan keselarasan penyajian informasi kinerja antar dokumen.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Meningkatkan kepedulian pegawai atas penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan memberikan bimbingan secara berkelanjutan khususnya pada keselarasan penyajian informasi kinerja antara dokumen Laporan Kinerja dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tribulan IV.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dilingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan pendalaman yang lebih memadai yaitu dengan melihat dari kualitas dokumen.

1.6.1 Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.6/10125/415.10/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah 81,47 dengan kategori A- predikat “**Memuaskan dengan Catatan**”, adapun rincian hasil evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

A. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat

Daerah :

- a. Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi RB tahun sebelumnya ditindaklanjuti
- b. Rencana aksi yang disusun belum berorientasi pada prioritas permasalahan utama serta menjawab catatan hasil RB tahun lalu

B. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah :

I. Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang

1. Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah :

- a. Mencerminkan bahwa sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi

2. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru :

- a. Telah dibentuk Tim Kerja Baru sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan pengelolaan sistem kerja tersebut telah memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN namun belum ditemukan adanya penyesuaian SOP dan Proses Bisnis (Probis) Perangkat Daerah yang menunjukkan adanya efisiensi dan efektivitas tim kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

3. Nilai SAKIP :

- a. Catatan atas implementasi AKIP dapat dilihat pada uraian c Laporan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025

4. Tingkat Digitalisasi Layanan :

- a. Tingkat 4 – Orkestrasi Lintas OPD

Kepuasan yang sangat tinggi menunjukkan pengalaman pengguna lintas layanan yang lancar, standar yang konsisten, serta kepastian layanan pada skala antar-OPD

5. Tingkat Pembangunan ZI :

- a. Telah mulai pembangunan pada sebagian/seluruh 6 area perubahan Zona Integritas namun belum berjalan minimal 1 tahun

6. Maturitas SPIP :

- a. Tidak dilakukan evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah

7. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat :

- a. Hasil kerja konsisten dan sangat memuaskan

8. Indeks Persepsi Anti Korupsi :

- a. Sangat jarang terjadi praktik korupsi

9. Indeks Pengawasan Kearsipan :

- a. Catatan atas pengelolaan arsip Perangkat Daerah dapat dilihat pada Risalah Hasil Audit Sementara Tahun 2025

10. Indeks Pengelolaan Keuangan :

- a. Sangat memuaskan

11. Indeks Pengelolaan Aset :

- a. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana pengadaan pada RKBMD dengan realisasi belanja BMD
- b. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan sudah sesuai
- c. Kesesuaian data belanja modal pada Aplikasi Penatausahaan Aset dengan Penatausahaan Keuangan sudah sesuai

II. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

A. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional

1. Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai :

Pada indikator Pelaksanaan, bukti dukung tidak menunjukkan keterkaitan dengan target indikator kinerja, dan target pada MPH Plt. Kepala Dinas belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan

2. Indeks Profesionalitas ASN :

Kecuali dimensi disiplin, pencapaian dari semua dimensi masih belum optimal

3. Tingkat Internalisasi Core Value ASN :

Upaya internalisasi yang telah dilakukan belum efektif dalam menanamkan budaya kerja yang telah ditentukan. Pemahaman nilai hanya menjadi slogan atau administratif saja, tetapi konsistensi pelaksanaan belum terlihat merata di organisasi.

4. Indeks Pelayanan Publik :

5. Indeks Kepuasan Masyarakat :

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, terdapat

rekomendasi sebagai berikut :

- a. Libatkan Agen Perubahan dalam mengawal perubahan organisasi dan didokumentasikan serta dilakukan monev capaian secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, dipastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD;
- c. Menyusun rencana aksi yang berorientasi pada prioritas permasalahan utama serta menjawab catatan hasil RB tahun lalu;
- d. Segera melaksanakan review dan evaluasi SOP dan proses bisnis perangkat daerah dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan oleh Tim Kerja yang telah dibentuk dan dituangkan ke dalam dokumen resmi perangkat daerah;
- e. Menindaklanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum pada uraian huruf d Laporan Hasil Evaluasi AKIP perangkat daerah tahun 2025;
- f. Mengukuhkan tata kelola One-Data melalui penetapan data steward, aturan mutu data, serta prefill untuk layanan prioritas;
- g. Membangun pusat integrasi (API gateway/ESB) dan penyeragaman nomor tiket lintas kanal (web, WA, loket);
- h. Mengoperasionalkan *observability* (pemantauan SLA/SLI : latensi, tingkat kesalahan, ketersediaan) disertai sistem peringatan insiden;
- i. Memformalkan manajemen perubahan (*change management*) agar perluasan fitur tidak menurunkan tingkat kepuasan;
- j. Melanjutkan proses pembangunan zona integritas mulai dari

- perencanaan program hingga melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021;
- k. Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat perangkat daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten;
 - l. Perangkat daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, menerapkan prinsip integritas, transparan dan akuntabel serta berinovasi dalam upaya pencegahan korupsi;
 - m. Menindaklanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum Risalah hasil audit sementara tahun 2025;
 - n. Pastikan RKBMD selaras dengan RKA dan aset riil yang akan dibeli oleh perangkat daerah. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Perlu diperhatikan juga terkait Pemeliharaan BMD, yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi baik atau rusak ringan, barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharaannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa di anggarkan belanja pemeliharaan;
 - o. Perlu dilakukan penyesuaian target pada MPH Plt. Kepala Dinas agar selaras dengan Perjanjian Kinerja (PK) serta penyusunan bukti dukung yang secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan target indikator kinerja;
 - p. Kinerja pegawai perlu ditingkatkan untuk meningkatkan predikat kinerja organisasi yang mempengaruhi predikat kinerja setiap

- pegawai, dan yang berpengaruh pada perolehan nilai dimensi kompetensi dan kinerja, dan untuk dioptimalkan lagi penilaian tahun berikutnya pada peningkatan kompetensi/diklat bagi ASN, dan Kualifikasi pendidikan masih ada yang belum optimal sesuai tingkat jabatan;
- q. Tegaskan kembali komitmen pimpinan dan implementasinya dalam aktivitas kerja. Kuatkan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk di evaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.
- r. Segera melakukan tindaklanjut dari RTL indeks kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan.

1.7 Potensi dan Permasalahan

Potensi Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 1.109,63 km² (110.963 Ha), atau menempati sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Kabupaten Jombang didominasi kawasan pertanian seluas 38.459,36 Ha (34,66%), kawasan hutan seluas 24.896 Ha (22,44%), kawasan perkebunan seluas 23.554 Ha (21,23%) serta kegiatan permukiman masih sebesar 19,95% atau seluas 22.142 Ha.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Besarnya persediaan pangan satu daerah merupakan salah satu ukuran pangan yang dapat mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan

yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang diukur dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) baik itu PPH konsumsi maupun PPH ketersediaan. Lancarnya system distribusi dan lembaga distribusi sangat menentukan ketersediaan pangan di suatu daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu dioptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu sumber pangan lokal terutama buah-buahan dan sayuran dengan program Kebun B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) mengingat kurang seimbangnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang yang masih tinggi dalam mengkonsumsi beras dan rendah untuk konsumsi protein hewani, sayur, buah-buahan dan umbi-umbian.

Potensi di bidang Perikanan Kabupaten Jombang memiliki panjang sungai 340,54 Km². Melihat dari potensi yang ada seperti diatas, maka potensi perikanan tangkap masih terdapat peluang untuk dikembangkan. Potensi perikanan lain yang ada di Kabupaten Jombang adalah Pengembangan budidaya perikanan air tawar juga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan mengingat luas potensi kawasan budidaya yang tersedia 70 Ha. Dari luas potensi kawasan yang tersedia baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya air tawar sebesar 60,7976 ha. Untuk restocking setiap tahun dilakukan penebaran di perairan umum. Peluang pasar produksi perikanan budidaya cukup besar karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Selain itu banyaknya tempat-tempat kuliner yang menyajikan menu ikan di Kabupaten Jombang juga menjadi salah satu peluang pemasaran hasil produksi ikan budidaya maupun tangkap.

Permasalahan dibidang pangan maupun perikanan yang masih dihadapi adalah :

- Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah belum optimal;
- Kurangnya volume cadangan pangan masyarakat yang dikelola oleh Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat akibat kurangnya pemahaman kelompok LPM akan pentingnya CPM;
- Kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten

Jombang akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;

- Belum optimalnya penanganan kemiskinan daerah/wilayah menyebabkan peningkatan jumlah RTM, sehingga menjadi salah satu aspek penyumbang desa rawan pangan;
- Keterbatasan SDM teknis dinas terkait penguasaan teknologi pemanfaatan lahan untuk kegiatan Kebun B2SA (metode hidroponik, airoponik dll);
- Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), Neraca Pangan Strategis (NPS) maupun dokumen PPH belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan terkait urusan pangan;
- Masih terdapat cemaran pada pangan segar asal tumbuhan baik kimia maupun mikroba;
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada. Masih memungkinkan pengembangan perikanan budidaya dengan sistem budidaya di lahan sempit menggunakan kolam terpal sedangkan pengembangan perikanan tangkap dengan mengintensifkan penangkapan di PUD dengan menambah jumlah sarana dan prasarana penangkapan;
- Masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Jombang jika dibanding Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional;
- Keterbatasan jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Jombang;
- Permasalahan harga pakan ikan pabrikan yang masih menjadi kendala pada pembudidaya;
- Belum optimalnya kinerja UPT Budidaya Perikanan Air Tawar;
- Masih adanya pembudidaya ikan yang menggunakan antibiotik dalam kegiatan usaha budidaya ikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagai bentuk penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Jombang disusun dengan berpijak pada sasaran, indikator dan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagai langkah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian **prioritas dan target pembangunan** dalam RPD.

Telaahan terhadap prioritas dan target pembangunan Daerah tersebut memberikan gambaran bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang pangan dan perikanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara langsung mendukung Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Tujuan ke-4** yaitu “**Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya**” dengan **Sasaran ke-1** yaitu “**Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah**”. Untuk dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan sektor pangan, perikanan, untuk mendorong pengentasan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan karakteristik kearifan lokal masyarakat Kabupaten Jombang. Dengan demikian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjabarkan melalui rumusan **Tujuan** di dalam Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 mengacu dengan sasaran RPD

Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan bidang perikanan dan peningkatan ketahanan pangan

Telaahan dalam pencapaian keberhasilan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks ketahanan pangan
2. Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan

Sedangkan **Sasaran** di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Produksi Perikanan
3. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi*
2. *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan*
3. *Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan*
4. *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Meningkatkan PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan ketahanan pangan	Indikator 1 : Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	NA	NA	87,53
	Indikator 2 : Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	NA	NA	NA	NA	0,99
Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	83,92	84,65	85,39	91,86	91,28

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Masyarakat						
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	NA	NA	NA	NA	70,84
Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21
Sasaran 3 : Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	NA	NA	NA	BB(79,39)

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Jombang telah menyusun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas serta menyusun matriks pembagian peran dan hasil mulai sekretaris, kepala bidang sampai dengan pelaksana. Perjanjian Kinerja tahun 2025 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati Jombang mengacu pada dokumen rencana strategis 2024-2026 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 2025, yaitu: (1) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, (2) Meningkatnya Produksi Perikanan dan (3) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif. Tolak ukur capaian sasaran strategis pertama “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan indikator **Skor Pola Pangan**. Tolak ukur capaian sasaran strategis kedua “Meningkatnya Produksi Perikanan” dengan indikator **Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**. Serta untuk Tolak ukur capaian sasaran strategis ketiga yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator **Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,28
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A(80,87)

Dengan adanya penyesuaian dokumen rencana strategis tahun 2025 – 2029 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung melalui 8 (delapan) program tersaji pada Table 2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53
		Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0,99
2.	Meningkatnya Ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,28
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	70,84
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21 %
4.	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,39
NO	PROGRAM	ANGGARAN	APBD
1.	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.6.115.247.354,-	APBD
2.	Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp.1.203.590.700,-	APBD
3.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp. 762.965.630,-	APBD
4.	Program penanganan kerawanan pangan	Rp.29.290.350,-	APBD
5.	Program pengawasan	Rp.101.805.810,-	APBD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

	keamanan pangan		
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp.80.806.100,-	APBD
7.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp.659.091.740,-	APBD
8.	Program pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan	Rp.298.721.300,-	APBD

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati Jombang. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	IKU	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks komposit aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan tahun -n	Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	$\frac{(\text{PDRB Thn } n - \text{PDRB Thn.}n-1)}{\text{PDRB Thn.}n-1} \times 100 \%$	Dokumen Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Menurut Pengeluaran Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pada tahun- n	Dokumen Analisis Situasi Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pada tahun- n	Dokumen Neraca Bahan Makanan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
5.	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	$\frac{(\text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.}n - \text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.}n-1)}{\text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.}n-1} \times 100 \%$	Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6.	Indeks Reformasi Birokrasi PD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun n	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi PD Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah yang menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola 2 (dua) urusan yaitu bidang pangan dan perikanan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan terukur atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja utama dari sasaran strategis dan capaian target dari masing-masing indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

4.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53	Belum rilis	
		Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0,99	Belum rilis	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,28	91,30	100,02%
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	70,84	71,02	100,25%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21%	0,21%	100%
4	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB (79,39)	A(81,47)	102,62%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk Nilai Kinerja Organisasi, berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi pada tahun 2025 tergolong dalam predikat **ISTIMEWA** dengan nilai kinerja organisasi sebesar 100,72%. Interpretasi Predikat Kinerja Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, memiliki tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Walaupun ada indikator kinerja pada **sasaran strategis satu**, dengan indikator kinerja (1). **Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan**, data untuk indikator pada sasaran strategis satu yang belum rilis.

Sasaran strategis kedua, dengan indikator kinerja satu (1). **Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi**; (2) **Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan**. Indikator kinerja Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi dan skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditentukan. Walaupun secara kuantitas belum cukup, dalam keragaman konsumsi ataupun penyediaan setiap jenis kelompok pangan belum optimal sesuai dengan anjuran pola pangan harapan, terutama kelompok pangan umbi-umbian, sayur dan buah, buah/biji berminyak serta pangan hewani. Sehingga perlu peningkatan program/kegiatan publikasi penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, terutama pada jenis kelompok pangan yang belum tercapai pada skor maksimal; edukasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Sedangkan untuk **sasaran**

strategis ketiga dan keempat dengan indikator kinerja berturut-turut adalah **Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan** dan **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditentukan. Adapun penjelasan detail terkait capaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Bidang Perikanan dan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan indikator :

- a. Indeks Ketahanan Pangan; dan
- b. Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan

Untuk indikator **Indeks Ketahanan Pangan**, merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. Indeks Ketahanan Pangan terdapat pada dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025, yang di publish oleh Badan Pangan Nasional. Pada dokumen tersebut, disampaikan bahwa adanya perubahan metodologi yang digunakan dalam pengolahan data Indeks Ketahanan Pangan wilayah tahun 2025, sehingga capaian kinerja Indeks Ketahanan pangan Tahun 2025 tidak dapat disandingkan secara kuantitatif terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan target IKP tahun 2025 disusun berdasarkan realisasi IKP tahun 2024 yang dihitung menggunakan metode perhitungan lama (variabel perhitungan menggunakan Data Potensi Desa 2024), sedangkan realisasi IKP tahun 2025 dihitung menggunakan metodologi baru yaitu variabel data hasil *Small Area Estimation (SAE) projection*.

Berikut terlampir perbedaan data dukung pengolahan Indeks Ketahanan Pangan :

Metode Lama	Metode Baru
Data Potensi Desa 2024 : 1. Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan	Data hasil <i>Small Area Estimation (SAE) Projection</i> :

2. Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, dan 3. Jumlah tenaga kesehatan	1. Rata-rata konsumsi energi per kapita per hari tingkat desa/kelurahan 2. Rata-rata konsumsi protein hewani per kapita per hari tingkat desa/kelurahan 3. <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU) tingkat desa/kelurahan 4. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tingkat desa/kelurahan 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun tingkat desa/kelurahan; dan 6. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tingkat desa/kelurahan
--	---

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Penyesuaian variabel data dukung yang digunakan menyebabkan data realisasi IKP tahun 2025 yang dirilis Badan Pangan Nasional tidak berada pada basis perhitungan data yang sama antara metode lama tahun 2024 dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator dengan pemutakhiran metodologi menjadi 12 (duabelas) indikator. Kondisi ini menyebabkan ketidakterbandingan antara target dan realisasi, sehingga tingkat pencapaian kinerja tidak dapat dihitung dengan diperbandingkan secara langsung. Namun demikian, untuk kepentingan analisis, berikut disajikan capaian kinerja dengan menggunakan target mengacu baseline metode lama serta penyesuaian target mengacu metode pemutakhiran :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53	80,93	92,45%
		Indeks Ketahanan Pangan *)	80,93	80,93	100%

Keterangan : *) = penyesuaian target *backcasting*

Dengan demikian, IKP tahun 2024 status capaian kinerja Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 jika menggunakan target yang mengacu pada baseline realisasi IKP 2024 awal sebesar 92,45%. Penyesuaian target IKP tahun 2025 berdasarkan IKP *backcasting* 2024 sebesar 80,93 dengan capaian sebesar 100%. Penyesuaian target IKP tidak dapat difasilitasi melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dikarenakan publish Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan (FSVA) Tahun 2025 tidak sesuai jadwal rilis yang telah ditentukan oleh Badan Pangan Nasional dan proses PK Perubahan telah selesai dilaksanakan. Data realisasi IKP tahun 2025 akan digunakan sebagai data baseline untuk penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan konsisten.

Untuk indikator kinerja utama kedua (2) yaitu **Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan** belum dapat disampaikan pada saat penyusunan dokumen LKJIP ini, dikarenakan data resmi PDRB Subsektor Perikanan tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan jadwal rilis resmi BPS, baru akan dipublikasikan pada Bulan Februari 2026. Berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Jombang, untuk jenis data PDRB Subsektor Perikanan pada tahun 2025 tidak dapat dirilis oleh BPS Kabupaten Jombang. Sehingga capaian kinerja indikator Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan diukur dan dievaluasi, realisasi capaian kinerja akan dilakukan pemutakhiran menggunakan pendekatan pengolahan data sektoral. Berdasarkan, hasil perhitungan data sektoral, realisasi pertumbuhan PDRB subsektor perikanan tahun 2025 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0,99	0,08*)	8%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2026

Kondisi ini mencerminkan antara target dan realisasi tidak bisa diperbandingkan secara langsung, dikarenakan target Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan tahun 2025 menggunakan baseline data yang dirilis oleh BPS (dengan memperhitungkan seluruh sektor penopang utama tidak hanya produksi) sedangkan untuk pengolahan data Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan yang dilakukan mandiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya menggunakan data sektoral yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sehingga data realisasi Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan tidak dapat diperbandingkan secara proporsional. Capaian Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan tahun 2026 sebesar 8%. Data realisasi 2026, akan digunakan untuk penentuan target kinerja tahun berikutnya.

Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja (1). **Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi** dimana target skor PPH konsumsi sebesar 91,28 terealisasi sebesar 90,30 atau mencapai 100,02 %. **Pola Pangan Harapan Konsumsi** merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan **skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi**. Pada Undang-Undang No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Terkait dengan hal tersebut, pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah, sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tersebut. Dari hasil survey konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan Konsumsi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa Skor PPH konsumsi memiliki realisasi baik sesuai dengan target yang ditentukan. Skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 90,30 memiliki artinya bahwa kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang jika dilihat dari keragaman konsumsi sudah beragam. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat Jombang secara kuantitas belum cukup memenuhi kaidah beragam; bergizi; seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat disebabkan tingkat keberagaman belum dapat dikatakan ideal maupun seimbang jika konsumsi dari 9 (sembilan) kelompok pangan belum sesuai dengan anjuran konsumsi pola pangan harapan. Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan, untuk kelompok pangan yang dikonsumsi ideal adalah kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Sementara untuk kelompok pangan lain yang belum dikonsumsi secara ideal berturut-turut sebagai berikut umbi-umbian, gula, sayur dan buah serta pangan hewani.

Angka konsumsi energi tahun 2025 sebesar 2.075,91 kkal/kap/hari (96,55% AKE = 2150 kkal/kap/hari) dan angka konsumsi protein sebesar 65,16 gr/Kap/hari (114,31% AKP= 57 gr/kap/hari). Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas konsumsi energi belum cukup namun sudah diatas 95%, sementara untuk kuantitas konsumsi protein sudah melebihi anjuran yang direkomendasikan (>100%). Tingkat konsumsi pangan berdasarkan skor PPH, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat antara lain kelompok padi – padian (beras giling) menyumbang 1.069,7 kal/291 gram, kelompok umbi-umbian dalam hal ini ketela pohon menyumbang 23,24 kal/15,1 gram. Untuk protein hewani yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan (99,87 kal/36,1 gram), sedangkan untuk kelompok minyak dan lemak adalah minyak sawit menyumbang 190,5 kal/21,5 gram; kelompok gula adalah gula pasir menyumbang 70,8 kal/17,9 gram; untuk kelompok sayur-sayuran menyumbang 49,8 kal/23,05 gram serta buah-buahan menyumbang 58,4 kal/24,8 gram.

Hal ini menunjukkan diversifikasi pangan masyarakat Kabupaten Jombang belum

beragam, sesuai dengan kaidah rujukan isi piringku. Masyarakat kabupaten Jombang relatif dominan konsumsi beras giling dan hanya salah satu jenis umbi-umbian. Dari hasil analisa skor pola pangan harapan konsumsi perlu adanya peningkatan konsumsi pangan untuk kelompok umbi-umbian; protein hewani serta buah dan sayur, sedangkan untuk kelompok pangan yang disarankan untuk mengurangi konsumsi adalah kelompok padi-padian, lemak dan minyak serta kacang-kacangan. Berdasarkan hasil analisa tersebut, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberagaman konsumsi dimasyarakat, antara lain :

- ❖ Umur suami
- ❖ Umur istri
- ❖ Pendidikan istri
- ❖ Jumlah anggota keluarga

Keempat faktor ini memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kecukupan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor pola pangan harapan konsumsi. Faktor yang memiliki pengaruh utama ada pada pendidikan dan umur istri, serta jumlah anggota keluarga. Ibu merupakan pendidik pertama dalam keluarga, semakin tinggi pendidikan seorang ibu menjadi modal utama dalam peran penyusunan pola makanan rumah tangga tersebut. Dengan tingkat pendidikan yang baik, berpengaruh signifikan untuk pemilihan kualitas dan jumlah makanan dibandingkan dengan pendidikan lebih rendah. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi keberagaman pola konsumsi, dipengaruhi oleh pendapatan keluarga/daya beli keluarga tersebut. Pendapatan keluarga akan berjalan searah dengan jumlah anggota keluarga pada aspek korelasi penyusunan pola konsumsi pangan keluarga. Semakin tinggi pendapatan keluarga akan memberikan peran penting pada kesejahteraan taraf hidup serta kesehatan keluarga yang pada akhirnya dapat mempengaruhi status gizi anggota keluarga.

Indikator kinerja (2). **Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan**. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dimana target skor PPH ketersediaan sebesar 70,84 terealisasi sebesar 71,02 atau mencapai 100,25 %. **Pola Pangan Harapan Ketersediaan** merupakan keragaman dan keseimbangan komposisi ketersediaan **pangan** pada suatu wilayah dengan pola pangan ideal berdasarkan kontribusi energi dari 9 kelompok pangan. **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan** mencerminkan keberagaman

ketersediaan pangan di suatu wilayah/daerah dan keseimbangan ketersediaan/pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat suatu wilayah/daerah. Capaian **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan** tahun 2025 mencerminkan komposisi ketersediaan pangan kabupaten Jombang sudah cukup beragam, namun belum sepenuhnya seimbang dan belum mencapai pola pangan ideal, masih adanya ketimpangan penyediaan antar kelompok pangan. Berdasarkan data ketersediaan energi dengan menggunakan acuan WNPG X, 2012; AKE = 2.400 kkal/kap/hari dan AKP = 63 gr/kap/hari; hasil perhitungan ketersediaan energi tahun 2025 sebesar 2.244 kkal/kap/hari (93% AKE) dengan komponen penyusun ketersediaan energi dengan sumber pangan nabati sebesar 1.995 kkal/kap/hari dan 248 kkal/kap/hari dari sumber pangan hewani. Adapun ketersediaan protein tahun 2025 sebesar 41,13 gr/kap/hr (65,28% AKP) dengan komponen penyusun ketersediaan protein dengan sumber pangan nabati sebesar 22,27 gr/kap/hari dan 18,86 gr/kap/hari dari sumber pangan hewani. Data tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Jombang masih didominasi pangan sumber karbohidrat (padi-padian) sedangkan kelompok pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih belum sesuai proporsi yang dianjurkan. Jika diselaraskan dengan hasil skor pola pangan harapan konsumsi menunjukkan bahwa ketersediaan pangan daerah secara mandiri belum sepenuhnya beragam dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Walaupun secara kuantitatif skor penyediaan kelompok gula, minyak dan lemak serta sayur dan buah lebih tinggi dibandingkan dengan skor pola pangan harapan konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya produksi pada kelompok pangan umbi-umbian; kacang-kacangan dan pangan hewani yang meliputi produksi daging, telur, susu dan ikan.

Sasaran strategis 2: **Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat** dapat terlaksana karena didukung 4 program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan; serta
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Sasaran strategis 3, Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan dengan target 0,21% terealisasi sebesar 0,21 % atau mencapai 100%. Pertumbuhan produksi ikan terealisasi sesuai target, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan baik budidaya ataupun tangkap telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian peningkatan produksi perikanan tahun 2025 dicapai melalui upaya penyelesaian berbagai permasalahan utama dalam kegiatan produksi perikanan antara lain peningkatan kualitas perairan akibat adanya limbah industri maupun limbah rumah tangga sehingga menurunkan kejadian penyakit dan kematian pada ikan; optimalisasi pendampingan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk pengawasan aktivitas penangkapan ikan secara *destructive* di perairan umum darat. Optimalisasi pendampingan pembudidaya ikan yang belum menerapkan CBIB maupun CPIB dalam kegiatan usahanya, fasilitasi sarana prasarana budidaya perikanan budidaya dan tangkap serta bimbingan teknis/ pelatihan teknis budidaya yang CBIB. Pada tahun 2025 jumlah pembudidaya ikan sebanyak 2.364 orang, jumlah pembenih atau Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebanyak 245 unit, jumlah nelayan 572 orang, KUB nelayan (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 24 kelompok, 215 kelompok pembudidaya ikan serta 26 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan serta 4 IKM yang bergerak dibidang usaha pengolahan ikan. Adanya peningkatan jumlah pembudidaya, nelayan, pembenih sampai dengan poklhasar merupakan faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi ikan maupun pendukung peningkatan angka konsumsi ikan di Kabupaten Jombang.

Untuk optimalisasi peningkatan produksi perikanan, salah satu upaya cepat penanganan layanan penyakit ikan dan registrasi kelompok perikanan melalui Aplikasi Si Patin Ceria. Merupakan layanan secara online untuk memudahkan pembudidaya dalam pengaduan kejadian penyakit ikan, sehingga bisa meminimalisir adanya kegagalan panen ikan pada pembudidaya. Serta percepatan registrasi kelompok perikanan agar dapat segera mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhan kelompok perikanan baik pembudidaya, pembenih ikan, nelayan ataupun kelompok pengolah dan pemasar hasil olahan perikanan.

Sasaran strategis kedua (2) yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan didukung

oleh 3 program antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta
3. Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sasaran strategis 4, Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dengan Indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Adapun target Indeks RB adalah “BB” (79,39), berdasarkan hasil penilaian terealisasi pada kategori “A-” dengan skor 81,47 sehingga capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah berada pada kategori “Memuaskan dengan Catatan”, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Walaupun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dan penguatan agar kualitas reformasi birokrasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 - Pengelolaan Reformasi Birokrasi memiliki skor 1,25
 - Rencana aksi memiliki skor 1,33
 - Monitoring dan Evaluasi memiliki skor 1,72
2. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 - Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki skor 41,90
 - Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah kabupaten Jombang yang Profesional memiliki skor 35,27

Dari hasil penilaian tersebut menggambarkan bahwa agenda Reformasi Birokrasi telah diterapkan secara terstruktur dan konsisten di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, terutama kualitas pelayanan publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat paripurna. Meskipun demikian masih perlu peningkatan kinerja pada komponen penilaian terdapat catatan-catatan yang masih perlu diperbaiki. Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan

kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan, Dinas Ketahanan pangan dan perikanan memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi hasil evaluasi indikator kegiatan utama pembentuk sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi. Tindak lanjut dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui penguatan implementasi program, kegiatan dan kebijakan internal serta peningkatan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap dan terintegrasi.

Sasaran strategis keempat (4) yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif diampu oleh Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja program pengampu sasaran strategis keempat (4) ini telah mencapai target yang telah ditentukan.

4.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) terakhir

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53	NA	NA	NA	Belum rilis
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0,99	NA	NA	NA	Belum rilis
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,28	87,43	90,18	90,50	90,30
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	70,84	NA	NA	NA	71,02

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21%	0,18%	0,186%	0,20%	0,21%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,39	51,03	80,61	78,55	81,47

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian pada masing masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2, Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2023 Skor PPH konsumsi mencapai 90,18 sedangkan pada tahun 2024 Skor PPH konsumsi mengalami peningkatan yaitu 90,50 atau meningkat sebesar 32% dan pada tahun 2025 Skor PPH konsumsi mencapai 90,30. Skor PPH konsumsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan merupakan indikator kinerja penyesuaian berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan, sehingga belum ada realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024. Skor PPH ketersediaan tahun 2025 memiliki mencapai 71,02.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mewujudkan sasaran “**Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**” antara lain adalah dukungan kebijakan pemerintah terkait upaya penjaminan akses pangan yang mampu memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, diantaranya melalui :

- ✚ penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP),
- ✚ penyaluran beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD),
- ✚ fasilitasi sarana prasarana kelompok lumbung pangan dan
- ✚ gerakan pangan murah, dalam rangka optimalisasi cadangan pangan masyarakat sebagai upaya penjaminan masyarakat dari ancaman rawan pangan transien.

- ✚ Pengembangan desa ketahanan pangan,
- ✚ fasilitasi bantuan bahan pangan bergizi untuk keluarga resiko stunting,
- ✚ pembinaan penganeekaragaman pangan terutama pangan lokal, gerakan edukasi dan pemberian pangan bergizi bagi siswa,
- ✚ gerakan memasyarakatkan makan B2SA merupakan upaya penjaminan masyarakat dari ancaman rawan pangan kronis. Dalam rangka menuju Skor PPH konsumsi dan ketersediaanyang ideal dimana pola konsumsi masyarakat sudah mulai beragam, bergizi, seimbang dan aman serta penyediaan pangan secara mandiri relatif cukup beragam, sehingga program kegiatan yang mewujudkan aspek ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan baik distribusi maupun harga pangan, keamanan pangan sampai dengan pangan tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik akan terus dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan supaya ketahanan pangan masyarakat dapat terjamin dengan baik.

Skor PPH konsumsi dan skor PPH ketersediaan diampu oleh empat (4) program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki indikator : persentase pemenuhan ketersediaan pangan dengan target 100% dan persentase unit kelompok masyarakat dan pelajar/sekolah yang melakukan diversifikasi pangan dengan target 9,8%. Capaian kinerja program untuk masing-masing indikator sebagai berikut, persentase pemenuhan ketersediaan pangan memiliki capaian sebesar 100% sedangkan persentase unit kelompok masyarakat dan pelajar/sekolah yang melakukan diversifikasi pangan memiliki capaian 9,8%.

Program pengawasan keamanan pangan memiliki indikator kinerja yaitu persentase sampel uji yang aman dengan target 98,77%. Adapun capaian kinerja program sebesar 98,81%, ditemukan satu sampel pangan segar yang terdeteksi mengandung cemaran residu pestisida. Program

penanganan kerawanan pangan memiliki indikator kinerja antara lain : persentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, adapun capaian indikator program sebesar 100%. Berdasarkan hasil analisa dokumen *Food Security and Vulnerability Atlas* tahun 2025 di Kabupaten Jombang tidak terdapat desa rawan pangan dengan prioritas 1, hanya ada prioritas 4, 5, dan 6. Dan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, dengan indikator kinerja pertumbuhan lumbung pangan yang aktif dengan target 0,372% memiliki capaian sebesar 100% dengan penambahan 1 (satu) kelompok lumbung yang aktif kembali.

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produksi ikan, pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,186%, tahun 2024 sebesar 0,20% dan tahun 2025 sebesar 0,21%. Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir pertumbuhan produksi ikan mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini merupakan dampak dari strategi program pemerintah dalam rangka upaya peningkatan produksi perikanan, melalui kegiatan fasilitasi hibah sarana usaha perikanan, kegiatan pelatihan teknis budidaya, perbenihan, pendampingan pengawasan penangkapan ikan pada perairan umum darat dapat mendorong peningkatan produksi perikanan serta terjadi peningkatan jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2025 sejumlah sepuluh pembudidaya ikan. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 sebesar 14.792 ton, yang terdiri dari komoditi ikan lele, gurami, patin, nila, mas dan bawal. Adapun produksi budidaya per jenis ikan (komoditi) adalah sebagai berikut :

No	Komoditi Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
1.	Lele	7.299,40	4.423.600.000
2.	Gurami	424,90	3.685.200.000
3.	Patin	2.066	63.701.150.000
4.	Nila	211,80	102.887.050.000
5.	Mas	227,70	9.644.200.000
6.	Bawal	4.562,20	122.096.350.000
	Jumlah	14.792	335.124.050.000

Sedangkan produksi ikan tangkap mencapai 151,40 Ton. Adapun jenis ikan yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) yang ditangkap oleh nelayan antara lain gabus (21 ton), mas (19,60 ton), lele (12,20 ton), tawes (23,9 ton), mujaer (33 ton), patin jambal (23,5 ton) dan wader (18,20 ton). Peningkatan produksi ikan budidaya juga turut didukung oleh ketersediaan benih di kabupaten. Pada tahun 2025, produksi benih ikan mencapai 304.088.000 ekor. Benih dihasilkan oleh unit-unit pembenihan rakyat (UPR) dan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar. Kegiatan perbenihan baik di UPR maupun di UPT masih sangat perlu ditingkatkan terutama terkait ketersediaan induk unggul yang menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghasilkan benih ikan. Salah satu upaya meningkatkan produksi ikan dengan adanya penambahan lahan yang digunakan untuk usaha budidaya perikanan, serta optimalisasi aspek produktivitas dengan peningkatan padat tebar benih ikan sebesar 5-10% dan optimalisasi pengendalian kejadian penyakit ikan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui UPT BPAT Ngoro melaksanakan optimalisasi program edukasi wisata perikanan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan minat dan kesukaan bidang perikanan.

Selain peningkatan produksi hasil perikanan perlu adanya dukungan terkait pengolahan hasil perikanan, salah satunya adalah melalui pelatihan olahan hasil perikanan, diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya poklaksar-poklaksar lebih banyak lagi yang memanfaatkan hasil produksi ikan pembudidaya ikan lokal kabupaten. Tahun 2025 pelaku usaha olahan hasil perikanan diberikan fasilitasi sertifikasi Halal untuk produknya, hal ini bertujuan untuk memberikan stimulan kepada pelaku usaha olahan perikanan dapat meningkatkan daya saing produk olahan di pasar sehingga dapat memperluas akses pemasaran. Dengan sertifikasi halal diharapkan produk olahan perikanan terjamin mutu, keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Sasaran Strategis 4, Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi. Realisasi tahun 2025 memiliki skor sebesar 81,47. Hal ini menunjukkan

seiring dengan peningkatan kualitas penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Rekomendasi hasil evaluasi oleh Tim Penilai selalu menjadi acuan bagi dinas dalam memperbaiki kualitas kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun depan. Demi mencapai peningkatan indeks reformasi birokrasi perlu upaya dan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai pada lingkup Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan integritas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan indikator kegiatan utama pada tata kelola pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan.

4.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Re Nstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	93,26	Belum rilis	0%
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	2,81%	Belum rilis	0%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	95,30	91,30	95,80%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	71,04	71,02	99,97%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,26%	0,21%	80,76%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,14%	81,47%	99,18%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 belum ada sasaran strategis yang telah mencapai target periode akhir renstra. Enam indikator kinerja utama ada empat indikator yang telah memiliki capaian kinerja hal ini dikarenakan dua indikator kinerja utama yaitu, indeks ketahanan pangan dan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan belum rilis angka realisasinya. Sedangkan untuk empat indikator kinerja utama lainnya telah memiliki capaian kinerja sebagai berikut :

1. Skor pola pangan harapan konsumsi memiliki capaian kinerja dibandingkan target akhir renstra sebesar 95,80%
2. Skor pola pangan harapan konsumsi memiliki capaian kinerja dibandingkan target akhir renstra sebesar 99,97%
3. Persentase pertumbuhan produksi ikan memiliki capaian kinerja dibandingkan target akhir renstra sebesar 80,76%
4. Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah memiliki capaian kinerja dibandingkan target akhir renstra sebesar 99,18%

sehingga perlu peningkatan kinerja dari masing-masing program pengampu sasaran strategis untuk mewujudkan tercapainya target sasaran strategis yang telah ditetapkan. **Sasaran strategis pertama (2)**, yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja : Skor Pola Pangan Harapan. Capaian pada sasaran strategis dengan indikator “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi” realisasi skor PPH Konsumsi tercapai 90,28 dari target 95,30 akhir renstra, capaian sebesar 95,80%, dan untuk indikator “Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan” realisasi skor PPH Konsumsi tercapai 71,02 dari target 71,04 akhir renstra, capaian sebesar 99,97%, capaian dua indikator kinerja pada sasaran strategis 2 tahun 2025 belum mencapai target akhir renstra yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran strategis ini dicapai melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Cadangan Pangan. Program ini memiliki intervensi kegiatan dalam mendukung target indikator kinerja yang telah dilakukan antara lain : fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan berupa hibah isi lumbung pangan sebanyak 3 kelompok, pengadaan CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah) sejumlah 65,15 ton. Program ini memiliki realisasi kinerja program sesuai target yang telah ditentukan, sebesar 100%. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan indikator kinerja : Persentase unit kelompok masyarakat dan pelajar/sekolah yang melakukan diversifikasi pangan serta persentase pemenuhan ketersediaan pangan dengan capaian program sebesar 100%. Program ini memiliki intervensi kegiatan dalam mendukung target indikator kinerja yang telah dilakukan antara lain : penyediaan data informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; penyediaan data stok dan pasokan pangan; pengembangan desa tematik ketahanan pangan; pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. Untuk meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang. Program penanganan kerawanan pangan, dengan indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Intervensi program ini dalam pencapaian target sasaran strategis satu (1) antara lain pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan serta penanganan kerawanan pangan kabupaten beserta rekomendasi tindak lanjut hasil pemutakhiran peta tersebut. Program ini menghasilkan analisa data kerawanan pangan yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pejabat pengambil kebijakan. Program pengawasan keamanan pangan dengan indikator persentase sampel uji yang aman. Program ini memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar, yang digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat keamanan pangan di wilayah kabupaten.

Program ini memiliki realisasi kinerja program yang mencapai dari target yang telah ditentukan, sebesar 100,04%. Walaupun seluruh program pengampu sasaran strategis satu memiliki capaian sesuai target kinerja yang ditentukan, akan tetapi tetap perlu melakukan strategi pencapaian program baik dari sisi ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan (kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pangan/konsumsi), stabilitas pangan serta keamanan pangan agar capaian sasaran strategis tetap dapat memenuhi target akhir renstra.

Untuk mewujudkan **sasaran strategis 3** yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja : Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan. Capaian pada sasaran strategis dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan” tercapai 0,21 % dari target akhir renstra 0,26% capaian sebesar 80,76%. Program ini memiliki intervensi berupa fasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan serta fasilitasi pembinaan dan pelatihan ketrampilan pembudidaya ikan serta pengolahan perikanan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengelolaan perikanan tangkap, memiliki indikator persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap. Intervensi program ini meliputi fasilitasi sarana dan prasarana nelayan PUD (perairan umum darat) meliputi hibah alat pancing ramah lingkungan serta pelatihan ketrampilan nelayan PUD. Program pengelolaan perikanan budidaya melakukan intervensi melalui sarana dan prasarana budidaya dan perbenihan ikan kepada kelompok pembudidaya serta perbenihan; pelatihan budidaya ikan bagi kelompok pembudidaya; pengawasan kesehatan ikan bagi kelompok pembudidaya serta operasional UPT. PBAT (Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar) Ngoro dan Bareng. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, program ini melakukan intervensi dalam peningkatan konsumsi ikan masyarakat serta ketrampilan pengolahan ikan untuk kelompok pengolahan dan pemasaran

ikan. Pada sasaran strategis 3, telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi untuk komponen penyusun produksi ikan, pada indikator program pengelolaan perikanan tangkap belum dapat mencapai target yang ditentukan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam penyusunan rencana aksi program kegiatan secara optimal serta monitoring rencana aksi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang mungkin terjadi serta upaya penyelesaian masalah sekaligus tindak lanjut yang harus dilakukan agar supaya program/kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan dampak/manfaat yang significant bagi masyarakat.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target diatas diantaranya ketersediaan benih yang mencukupi dan berkualitas, pemberian bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha perikanan (pembudidaya, pembenih maupun nelayan), pembinaan yang intensif, pelatihan keterampilan budidaya untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan yang bisa dilaksanakan di areal yang sempit /lahan terbatas dengan memanfaatkan kolam terpal. Pembinaan dan pendampingan yang intensif untuk nelayan perairan umum darat (PUD).

Untuk mewujudkan **sasaran strategis 4** yaitu Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Realisasi sasaran strategis ini sebesar 81,47 dari target akhir renstra 82,14 sehingga memperoleh capaian sebesar 99,18%. Sasaran strategis ini diampu oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Ket
-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-----

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Belum rilis	73,00	Indeks Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	Belum rilis	10,11	Badan Pusat Statistik Tahun 2025
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	90,30	95,10	Angka Skor PPH Konsumsi Nasional Tahun 2025
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	71,02	97,55	Angka Skor PPH Ketersediaan Nasional Tahun 2025
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21%	3,8	Data pertumbuhan produksi ikan nasional tahun 2025
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81,47	87,41	Skor Indeks RB Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun 2024

Realisasi skor PPH konsumsi kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 90,30 masih dibawah skor PPH konsumsi nasional sebesar 95,10 sedangkan untuk skor PPH ketersediaan kabupaten Jombang sebesar 71,02 jika dibandingkan dengan skor PPH ketersediaan nasional sebesar 97,55. Kabupaten Jombang untuk 2 (dua) indikator skor PPH baik konsumsi maupun ketersediaan masih berada di bawah angka realisasi nasional, sehingga masih sangat diperlukan adanya intervensi pemerintah daerah yang terintegrasi untuk bisa meningkatkan pencapaian skor PPH konsumsi dan ketersediaan kabupaten. Hal ini dikarenakan skor PPH konsumsi merupakan instrument/parameter untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH,

konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Sedangkan skor PPH ketersediaan adalah indikator yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan keberagaman ketersediaan pangan di suatu wilayah berdasarkan kontribusi berbagai kelompok pangan terhadap kecukupan energi. Skor PPH konsumsi dan ketersediaan menjadi sangat penting karena merupakan indikator mutu gizi, k e r a g a m a n k e t e r s e d i a a n dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan konsumsi dan ketersediaan pangan. Nilai skor PPH konsumsi merupakan refleksi dari tingkat keberagaman konsumsi masyarakat, sehingga apabila dibandingkan dengan skor PPH konsumsi nasional, skor PPH konsumsi kabupaten Jombang masih relative rendah karena hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kebiasaan konsumsi masyarakat, keragaman pola asuh dimana tingkat kemajemukan masyarakat di kabupaten tentu saja berbeda dengan level nasional. Dalam pencapaian indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi telah dilakukan beberapa kegiatan strategis antara lain, pengawasan keamanan pangan, pengembangan desa mandiri pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), sosialisasi B2SA, bimbingan teknis warung B2SA dan dapur B2SA. Dengan telah dilakukannya kegiatan strategis diatas, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang sesuai dengan kaidah pola pangan harapan.

Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025 terealisasi sebesar 0,21%, sedangkan persentase pertumbuhan produksi ikan nasional sebesar 3,80%. Untuk produksi perikanan Kabupaten Jombang perlu terus berupaya meningkatkan pertumbuhan produksi perikanan tersistematik sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Pertumbuhan produksi ikan kabupaten sangat dipengaruhi oleh produksi ikan budidaya dan tangkap, dimana produksi ikan budidaya sangat tergantung pada biaya produksi terutama pakan pabrikan dan kemampuan pemasaran. Permasalahan utama dari sektor perikanan merupakan memasarkan hasil panen dengan nilai jual yang baik

sepanjang tahun. Pada tahun 2025 harga jual ikan segar sangat fluktuatif serta harga pakan pabrikan yang mengalami lonjakan, dapat mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan. Salah satu upaya yang dilakukan dinas dalam rangka mendorong pembudidaya untuk giat kembali dalam kegiatan usaha perikanan adalah melalui pendampingan berupa pemberian bimtek/pelatihan teknis, pemberian fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya yang didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Untuk produksi ikan tangkap bergantung pada kondisi cuaca dan kondisi perairan umum, melalui kegiatan *restocking* (penebaran benih ikan di perairan umum) yang dilakukan oleh dinas diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung kelestarian sumberdaya perairan yang ada di Kabupaten Jombang selain itu untuk mendukung nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan maka dinas memberikan fasilitasi berupa bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Secara umum, untuk produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain maupun provinsi dan nasional, karena masing-masing daerah mempunyai potensi alam maupun luas lahan serta karakteristik yang berbeda-beda, dengan demikian pertumbuhan produksi perikanan juga akan berbeda pada masing-masing daerah. Hasil produksi perikanan dari masing-masing daerah kabupaten/kota akan berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi perikanan pada tingkat provinsi maupun nasional. Sasaran strategis ini diampu oleh beberapa program, antara lain :

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan *restocking* di perairan umum, fasilitasi sarana penangkapan ikan bagi KUB
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya, bimbingan teknis perikanan, fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui kegiatan bimtek pengolahan ikan serta pemantapan Gemarikan.

4.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja

Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menerima penghargaan di bidang perikanan, atas Pencapaian sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang berperan aktif pengembangan sentra kuliner berbasis olahan hasil perikanan.

Sedangkan dalam event Reformasi birokrasi award Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Terbaik Tingkat Kabupaten Jombang



Sedangkan penjelasan pendukung pada setiap sasaran strategis yang telah dilakukan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi berhasil tercapai skor 91,30 capaian realisasi sebesar 100,02 % dengan tingkat keberhasilan “Berhasil”. Sedangkan untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan tercapai dengan skor 71,02; capaian realisasi sebesar 100,25%. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor yang bersifat internal (individual) seperti pendapatan, keyakinan (budaya dan religi), serta pengetahuan gizi, maupun faktor eksternal seperti faktor produksi, ketersediaan dan keragaman ketersediaan, distribusi, serta promosi/iklan. Dari banyak faktor tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupaya terus meningkatkan perannya melalui

program kegiatan yang bisa mewujudkan Skor Pola Pangan Harapan konsumsi maupun ketersediaan agar mencapai skor ideal, diantaranya yang mendukung keberhasilan kinerja tahun 2025 adalah adanya program sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan antara lain adalah fasilitasi hibah isi lumbung pangan dan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui kegiatan antara lain pembinaan pemanfaatan kebun B2SA dan pembinaan warung B2SA pada Desa Tematik Ketahanan Pangan, pembinaan olahan pangan, pembinaan lumbung dan perberasan, survey harga pangan strategis serta gelar pangan murah. Serta pemberian hibah bahan pangan bergizi untuk keluarga resiko stunting dan kegiatan Gelar Pangan Murah.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan didukung kegiatan pengujian keamanan pangan dan pembinaan keamanan pangan
- Program Penanganan Kerawanan Pangan, melalui rekomendasi penanganan desa rawan pangan hasil dari peta FSVA.

Beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pencapaian sasaran adalah

1. Keterbatasan daya beli masyarakat untuk pemenuhan konsumsi pangan;
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga masyarakat cenderung masih memiliki kebiasaan konsumsi dari jenis padi-padian dan kelompok protein nabati;
3. Preferensi dan budaya pola konsumsi yang telah menjadi kebiasaan
4. Rendahnya akses terhadap pangan berkualitas dan harga terjangkau
5. Belum beragamnya produksi pangan domestik wilayah

6. Belum optimalnya efisiensi rantai pasok bahan pangan

7. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sasaran strategis antara lain :

1. Penguatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui peningkatan intensitas edukasi dan kampanye konsumsi pangan B2SA serta promosi pangan lokal non beras non terigu, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah gerakan pemberian kudapan bergizi bagi siswa, gerakan memasyarakatkan makan B2SA, workshop B2SA bagi kader PKK serta bimbingan teknis pengolahan pangan lokal dan fasilitasi sertifikasi halal;
2. Penjaminan mutu dan keamanan pangan melalui fasilitasi pengadaan rapid test bahan pangan, sebagai alat deteksi dini keamanan pangan segar yang ada di pasaran. Serta peningkatan publikasi hasil uji laboratorium keamanan pangan segar kepada lintas sektor;
3. Penguatan akses dan keterjangkauan pangan bergizi melalui penguatan distribusi pangan dengan optimalisasi gerakan pangan murah, penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah, fasilitasi hibah bahan pangan bergizi bagi keluarga resiko stunting;
4. Peningkatan peran lintas sektor dan pemangku kepentingan melalui optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah pengampu, TP-PKK, stake holder pangan ataupun lembaga pendidikan;
5. Integrasi program skor PPH dengan program prioritas daerah, melalui kegiatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, wirausaha baru.

Sasaran Strategis 3. Meningkatkan Produksi Perikanan
dengan indikator Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan berhasil tercapai 0,21% atau capaian realisasi sebesar 100 % dengan tingkat keberhasilan “Berhasil”. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat faktor-faktor penentu keberhasilan usaha perikanan. Upaya tersebut difokuskan pada pemenuhan ketersediaan induk berkualitas dan

benih ikan berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi aspek pemasaran hasil perikanan. Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain melalui program :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan optimalisasi pendampingan kelompok masyarakat pengawas; kegiatan restocking di perairan umum dan fasilitasi sarana penangkapan ikan bagi KUB;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan bimbingan teknis budidaya ikan; kesehatan ikan dan perbenihan; fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui kegiatan bimbingan teknis pengolahan ikan kepada kelompok binaan dan masyarakat serta pemantapan Gerakan memasyarakatkan makan ikan.

Selain faktor-faktor pendukung/pendorong diatas ada beberapa kendala ikan/pembudidaya untuk berkelompok, antara lain :

1. Kapasitas dan pengetahuan pembudidaya yang bervariasi;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi;
3. Biaya pakan yang relatif tinggi;
4. Adanya ancaman penurunan kualitas lingkungan perairan dan penyakit ikan;
5. Adanya dampak perubahan iklim;
6. Fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar.

Adapun strategi upaya tindak lanjut hambatan yang ada sebagai berikut peningkatan ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas; pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis ataupun pelatihan; fasilitasi sarana prasarana produksi perikanan; peningkatan manajemen pemberian pakan; optimalisasi penggunaan Aplikasi Si Patin Ceria untuk pengendalian kejadian penyakit ikan dan peningkatan kualitas lingkungan perairan; mendorong penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan serta kesiapsiagaan terhadap perubahan cuaca ekstrem; mendorong kemitraan dengan ooftaker dan meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan yang inovatif.

Faktor pendukung pencapaian sasaran strategis yaitu :

1. Penyediaan induk ikan yang berkualitas sebagai faktor pendukung utama menyediakan benih bersertifikat;
2. Sinergitas pusat dan daerah melalui penyuluh perikanan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendampingan pembudidaya ikan;
3. Peningkatan kesadaran pembudidaya ikan terkait penerapan CBIB maupun CPIB

Sasaran Strategis

4. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang telah mencapai target dengan predikat “Memuaskan dengan Catatan” dengan skor 81,47 menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan. Walaupun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dan penguatan agar kualitas reformasi birokrasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, meliputi penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan manajemen risiko serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negaran dan penumbuhan budaya kerja yang berorientasi kinerja dan integritas tersu didorong guna mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien sehingga berdampak nyata sesuai dengan target yang ditetapkan.

Empat sasaran strategis tersebut didukung oleh 8 (delapan) program, dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk kinerja terealisasi sesuai dengan target. Adapun analisis program yang mendukung keberhasilan/kegagalan antara lain adalah :

- Dalam rangkan mendukung sasaran strategis melalui Program

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan cadangan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah fasilitasi hibah kepada kelompok lumbung dalam bentuk pengisian lumbung pangan serta didukung dengan penambahan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dilaksanakan kegiatan survei konsumsi pangan berbasis **Pola Pangan Harapan (PPH)** sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang terintegrasi, antara lain gerakan pemberian kudapan bergizi bagi siswa, Gerakan Memasyarakatkan Makan B2SA, pelatihan pengolahan pangan lokal, pemberian bantuan bahan pangan bergizi kepada keluarga berisiko stunting, serta pembinaan mutu dan keamanan pangan. Selain itu, dilakukan pula pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan, pelaksanaan gelar pangan murah, serta kegiatan pendukung lainnya yang terintegrasi dalam Program Desa Tematik Ketahanan Pangan. Di sisi lain, sebagai bagian dari penguatan sistem informasi dan pengendalian ketahanan pangan, disusun Neraca Bahan Makanan (NBM), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), prognosa pangan, serta penyediaan informasi harga bahan pangan di tingkat produsen, pedagang grosir, dan pedagang eceran guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu didukung kegiatan berupa pengujian sampel pangan segar serta rekomendasi atas hasil pengujian laboratorium keamanan pangan segar
- Program Penanganan Kerawanan Pangan yaitu berupa kegiatan monitoring dan evaluasi dan pembinaan pada desa rawan pangan sesuai dengan hasil Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 serta pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2025
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap didukung dengan kegiatan *restocking* ikan di perairan umum darat (PUD), pendataan ikan tangkap, hibah sarana perikanan tangkap, bimbingan teknis nelayan

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya didukung dengan kegiatan bimtek bagi UPR dan pembudidaya, penilaian kelas kelompok budidaya perikanan, pembinaan dan penyuluhan kelembagaan usaha perikanan, pendataan produksi ikan budidaya, bimbingan teknis penyakit ikan serta fasilitasi hibah sarana budidaya, pengadaan sarana perbenihan di UPT, monitoring dan evaluasi kesehatan ikan, uji kualitas air dan ikan pada pembudidaya, serta pelaksanaan kaji terap SAP (sentra aquabis perikanan). Seluruh kegiatan tersebut adalah dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan dan pada tahun 2025 terdapat kenaikan produksi perikanan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, antara lain :
 1. Rendahnya minat dalam usaha budidaya.
 2. Rendahnya nilai jual produk hasil perikanan
 3. Tingginya kasus penyakit ikan yang menyerang
 4. Tingginya biaya produksi perikanan
- Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, didukung oleh kegiatan pelatihan olahan hasil perikanan, dalam rangka mendukung peningkatan produksi olahan hasil perikanan di kabupaten, selain itu juga dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi ikan kabupaten dilaksanakan kegiatan fasilitasi pelaku usaha pelaku pengolahan hasil produksi perikanan, sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan menghadirkan balita stunting yang diberikan fillet ikan sebanyak 750 kg untuk peserta Gemarikan.

a. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 mendapat Anggaran Belanja Langsung dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 9.363.505.416,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.455.583.315,- atau sebesar 90,30 %.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang mengampu 4 sasaran strategis, 8 program dan pagu anggaran sebesar Rp 9.363.505.416,- untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Adapun perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	87,53	Belum rilis	0%	2.097.652.490	2.044.122.437	97,45%
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0,99%	Belum rilis	0%	1.150.605.572	973.209.052	84,58%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,28	91,30	100,02%	2.097.652.490	2.044.122.437	97,45%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	70,84	71,02	100,25%	2.097.652.490	2.044.122.437	97,45%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,21	0,21%	100%	1.150.605.572	973.209.052	84,58%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,39	81,47	102,62%	6.115.247.354	5.438.251.826	88,93%

Dari tabel diatas, sebesar 87,92%. Secara umum keempat program penunjang indicator sasaran strategis memiliki capaian kinerja dan anggaran yang tergolong Baik.

Untuk indicator kinerja persentase pertumbuhan produksi ikan memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 95%. Program pendukung indicator kinerja tersebut ada tiga program, antara lain program pengelolaan perikanan tangkap dengan capaian kinerja sebesar 92,86% dan capaian anggaran sebesar 92,64%; kemudian program pengelolaan perikanan budidaya memiliki capaian kinerja sebesar 100% serta capaian anggaran sebesar 93,55% dan untuk program terakhir yaitu program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki capaian kinerja sebesar 106,42% dan capaian anggaran sebesar 97,23%. Secara umum capaian program pendukung indicator kinerja persentase pertumbuhan produksi ikan dalam kategori baik. Indikator kinerja pada sasaran strategis kedua (2) dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Untuk indicator kinerja yang ketiga yaitu nilai evaluasi AKIP perangkat daerah memiliki capaian kinerja sebesar 96,88% dan capaian anggaran sebesar 94,61%, indicator tersebut memiliki satu program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran sebesar 100% dan 94,61%. Pada indicator kinerja ketiga juga tergolong dalam kategori baik. Secara umum capaian untuk ketiga indicator kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tergolong dalam kategori Baik.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi merupakan tolak ukur keberhasilan yang dinilai dari besarnya anggaran yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari program yang dilaksanakan. Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mencapai outcome dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Belum rilis	97,81%	0%
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	Belum rilis	86,49%	0%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	100,02%	97,81%	2,21%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	100,25%	97,81%	2,44%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	100%	86,49%	13,51%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	102,62%	88,93%	13,69%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya sasaran strategis, dari 4 (empat) sasaran strategis perangkat daerah memiliki tingkat efisiensi, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang menunjukkan rasio tingkat efisiensi terbesar adalah indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 13,69%, dengan capaian kinerja sebesar 88,93% dan penyerapan anggaran sebesar 102,62%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, dengan capaian kinerja sebesar 102,62% dan penyerapan anggaran sebesar 88,93% sehingga tingkat efisiensinya 13,69%. Silpa anggaran pada penyediaan gaji, tunjangan ASN dan tambahan penghasilan pegawai serta belanja penambah daya tahan tubuh pegawai.

2. Rasio tingkat efisiensi yang berikutnya pada sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan sebesar 13,51% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 86,49%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :
 - a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap, dengan capaian kinerja sebesar 92,80% dan penyerapan anggaran sebesar 96,75% sehingga tingkat efisiensinya -3,95%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja hibah barang budidaya ikan. Nilai standart satuan harga lebih tinggi dari nilai realisasi benih di pasaran. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 91,27% sehingga tingkat efisiensinya 8,73%. Adanya silpa anggaran belanja hibah barang sarana prasarana perikanan, belanja benih ikan, pakan ikan pada kegiatan budidaya ikan pada Sentra Aquatik Perikanan, dikarenakan standar satuan harga lebih tinggi dari harga realisasi. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia
 - c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator persentase pertumbuhan nilai produksi hasil olahan perikanan, dan angka konsumsi ikan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 71,45% sehingga tingkat efisiensinya 28,55%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja fillet ikan dan bahan praktek untuk kegiatan gerakan makan ikan. Nilai standart satuan harga lebih tinggi dari nilai realisasi fillet ikan di pasaran. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.
3. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat dengan indikator Skor PPH Konsumsi memiliki rasio tingkat efisiensi sebesar 2,21%, dengan capaian kinerja sebesar 100,02% dan penyerapan anggaran sebesar

97,81%. Sedangkan untuk indikator Skor PPH Ketersediaan memiliki rasio tingkat efisiensi sebesar 2,44%, dengan capaian kinerja sebesar 100,25% dan penyerapan anggaran sebesar 97,81%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator persentase cadangan pangan masyarakat, dengan capaian kinerja sebesar 101,18% dan penyerapan anggaran sebesar 98,01% sehingga tingkat efisiensinya 7,63%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan hibah gabah untuk kelompok lumbung pangan. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.
 - b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator persentase unit kelompok masyarakat dan pelajar/sekolah yang melakukan diversifikasi pangan, dengan capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan anggaran sebesar 93,33% sehingga tingkat efisiensinya 6,67%. Efisiensi anggaran disebabkan adanya pemutakhiran BNBA penerima bantuan sosial bahan pangan bergizi untuk keluarga resiko stunting dikarenakan perubahan domisili.
 - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator meningkatnya persentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan anggaran sebesar 97,76% sehingga tingkat efisiensinya 2,24%. Efisiensi disebabkan adanya silpa anggaran pada belanja sosialisasi, dikarenakan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.
 - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 99,14% sehingga tingkat efisiensinya 0,86%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja jasa laboratorium.
4. Untuk sasaran strategis Meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan Ketahanan pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan memiliki rasio tingkat efisiensi yang belum terukur, dikarenakan adanya Data Lag/belum rilis data sedangkan penyerapan anggaran sebesar 97,81% untuk Indeks Ketahanan Pangan dan 86,49% untuk Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :

Tabel 3.2.3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Kepala Dinas	1	1	100%
Sekretaris	1	1	100%
Perencana Ahli Muda	0	1	0%
Perencana Ahli Pertama	0	1	0%
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	100%
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	0%
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	0%
Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian	1	1	100%
Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1	100%
Kepala Bidang Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1	100%
Kepala Bidang Produksi Perikanan	1	1	100%

Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Kepala Bidang Agribisnis	1	1	100%
Kepala UPT Budidaya Perikanan	0	1	100%
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	4	7	57,14%
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1	7	14,29%
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	0	2	0%
Pengawas Perikanan Ahli Muda	0	2	0%
Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	2	50%

Pengawas Perikanan Ahli Madya	0	1	0%
Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	0	1	0%
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	1	1	100%
Pengelola Kepegawaian	0	1	0%
Pengadministrasi Umum	0	1	0%
Pengelola Surat	0	1	0%
Pengemudi	0	1	0%
Petugas Keamanan	0	1	0%
Pramu Bakti	0	1	0%
Pengelola Pemanfaatan Barang	1	1	100%
Bendahara	1	1	100%
Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0	1	0%
Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	0	1	0%
Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Pengelola Distribusi dan Pemasaran	0	1	0%
Pengelola Ketahanan Pangan	1	2	50%
Pengelola Penganekaragaman Pangan	0	1	0%
Pengelola Pola Pangan Harapan	0	1	0%
Analisis alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	0	1	0%
Analisis Perikanan Budidaya	1	1	100%
Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	0	1	0%
Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	1	0%
Analisis Kenelayanan	0	1	0%
Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	1	100%

Analisis Potensi Perbenihan	0	1	0%
Analisis Mutu Hasil Perikanan	0	1	0%
Pengelola Pengembangan Pembinaan Usaha	0	1	0%
Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	0%
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	0	1	0%
Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	1	1	100%
Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	0	1	0%
Pengawas Pertanian Ahli Muda	1	1	100%
Pengawas Pertanian Ahli Pertama	0	1	0%
Pengawas Pertanian Ahli Madya	0	1	0%
Rerata Pemenuhan	34,73%		

Tabel

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	PNS	24
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
	Fungsional Khusus (JFT)	10
	Pelaksana	6
2	NON PNS	26
	Tenaga Honorar Dinas	26
	Tenaga Pendamping	0
TOTAL		50

3.2.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan Pegawai	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Bidang Perikanan dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	0%	34,73%	Tidak terukur

	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0%	34,73%	Tidak terukur
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	100,02%	34,73%	65,29%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	100,25%	34,73%	65,52%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	100%	34,73%	65,27%
Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	102,62%	34,73%	67,89%
Rerata Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia				65,99%

Dari tabel 3.2.3 Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kebutuhan pejabat berdasarkan jabatan sebanyak 51 jabatan dan terisi sebanyak 26 jabatan. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2025 sebanyak 50 orang, dengan capaian pemenuhan pegawai sebesar 34,73%. Sedangkan capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (satu) yaitu meningkatnya PDRB sektor unggulan bidang perikanan dan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator Indeks ketahanan pangan dan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebesar 0% hal ini dikarenakan data belum rilis sehingga efisiensi sumberdaya manusia untuk sasaran strategis 1 tidak terukur. Sasaran strategis 2 (dua) yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan indikator Skor PPH konsumsi memiliki capaian kinerja sebesar 100,02% sehingga efisiensi sumberdaya manusia sebesar 65,29% dan indikator Skor PPH ketersediaan memiliki capaian kinerja sebesar 100,25% sehingga efisiensi sumberdaya manusia sebesar 65,52%. Untuk sasaran strategis 3 (tiga) meningkatnya produksi perikanan dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan, memiliki capaian kinerja sebesar 100% sehingga efisiensi sumber daya manusia sebesar 65,27%. Sasaran strategis 4 (empat) terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah memiliki capaian kinerja sebesar 102,62% sehingga efisiensi sumber daya manusia sebesar 67,89%, sekaligus menjadi sasaran strategis dengan tingkat efisiensi sumber daya manusia tertinggi. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki efisiensi sumberdaya manusia rata-rata sebesar 65,99%.

Tabel 3.2.5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (perikanan)	2	2	100
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium (bareng & ngoro)	2	2	100
3	Mesin Pembuat Pellet	1	1	100
4	Transportable Generating Set	1	1	100
5	Pompa Air	5	5	100
6	Station Wagon	4	4	100
7	Sepeda Motor	34	34	100
8	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (Assesoris Sepeda Motor + Blok Stiker Jupiter dan KLX)	4	4	100
9	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (Hidroulik otomastis)	1	1	100
10	ph meter (Quasi Peak Meter)	4	4	100
11	Lemari Penyimpan	1	1	100
15	Alat Peternakan lainnya (Conikel Tank + Perlengkapannya)	10	10	100
16	Alat Peternakan lainnya (Rak Conikel)	10	10	100
17	Alat Peternakan lainnya (Blower/Airator)	1	1	100
18	Alat Peternakan lainnya (tabung oksigen)	1	1	100
19	Lemari Besi/Metal	1	1	100
20	Lemari Kayu	9	9	100
21	Rak Kayu	5	5	100
22	Filing Cabinet Besi	14	14	100
23	Brandkas	1	1	100
24	Lemari Kaca	2	2	100
25	White Board	2	2	100
26	Alat Penghancur Kertas	1	1	100
27	Mesin Absensi	1	1	100
28	Overhead Projector (Infocus)	1	1	100
29	Kursi Kayu	1	1	100
30	Meja Rapat	3	3	100
31	Tempat Tidur Kayu	26	26	100

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
32	Meja 1/2 Biro	59	59	100
33	Kursi Tamu	1	1	100
35	Kursi Putar	5	5	100
36	Kursi Biasa	46	46	100
37	Kursi Lipat	5	5	100
39	Meja Komputer	1	1	100
40	Sofa	5	5	100
41	Meubeler lainnya (pigora)	8	8	100
43	UPS	1	1	100
44	AC standing	1	1	100
45	Mesin Pemotong Rumput	1	1	100
46	Lemari Es	5	5	100
47	A.C. Window	3	3	100
48	A.C. Split	20	20	100
49	Kipas Angin	11	11	100
50	Kompor Gas (Alat Dapur)	4	4	100
51	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	5	100
52	Tabung Gas	1	1	100
53	Alat Dapur lainnya (Meja Dispencer)	5	5	100
54	Alat Dapur lainnya (Galon Maaqo)	5	5	100
55	Televisi	4	4	100
56	Sound System	3	3	100
57	Wireless	1	1	100
58	Microphone Table Stand	1	1	100
59	Camera film	1	1	100
60	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19	19	100
61	Dispenser	5	5	100
62	Handy Cam	1	1	100
63	Gordyin/Kray	113	113	100
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain (gapuro festifal pangan)	1	1	100
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tandon air)	1	1	100
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	100
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7	100
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	100
69	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	1	100
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	100
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	100

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	100
73	Buffet Kaca	2	2	100
74	Microphone	3	3	100
76	peralatan studio audio lainnya (Colum Speaker)	2	2	100
77	peralatan studio audio lainnya (amplifier)	1	1	100
78	peralatan studio audio lainnya (horn speaker)	1	1	100
79	Camera Electronic	12	12	100
80	Layar Film/Projector	8	8	100
81	Telephone (PABX)	2	2	100
82	Facsimile	3	3	100
83	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1	100
84	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	1	100
85	Alat Kesehatan Umum lainnya (Pembelian Cup Sealer	1	1	100
86	Camera Photo Micrograph	1	1	100
87	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	1	1	100
88	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	3	3	100
89	Spineret	1	1	100
90	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1	100
91	Unit Penggilingan	1	1	100
92	Mangkok Porselin	1	1	100
93	Mikroskop	1	1	100
94	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	4	4	100
95	Test Kit	1	1	100
96	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)(soil pH)	2	2	100
97	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) (secchi disk)	2	2	100
98	Alat Khusus Keamanan Lainnya (cctv 1 paket 6 unit) +1	2	2	100

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
99	P.C Unit	8	8	100
100	Lap Top	19	19	100
101	Note Book	25	25	100
102	Hard Disk	4	4	100
104	Monitor	2	2	100
105	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	55	100
106	Peralatan Personal Komputer lainnya (Hardisk dll)	8	8	100
108	Netware Interface External	1	1	100
109	Peralatan Komputer lainnya (Absensi elektronik sidik jari)	1	1	100
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	5	100
111	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	4	100
112	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
113	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	2	100
114	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	100
115	Bangunan Kolam/Bak Ikan	7	7	100
116	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	7	7	100
117	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	100
118	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1	100
119	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2	2	100
120	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	1	100
121	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	1	100
122	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
123	Jaringan air minum lainnya	1	1	100
124	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1	100
125	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
126	Alat Pasca Panen Lainnya (Alat Penepungan)	1	1	100
127	Alat Peternakan Lainnya (Mesin Kicir Merk Nagrong)	1	1	100
128	Alat Peternakan lainnya (Blower Ikan)	1	1	100
129	Bangku Tunggu	1	1	100
130	Kasur/Spring Bed	10	10	100
131	Meubeler lainnya (Bedcover/Seprey	22	22	100
132	Jam Elektronik	5	5	100
133	Telephone Hybrid	2	2	100
134	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	100
135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100
136	Tenda	4	4	100
TOTAL		802	802	100

Tabel 3.2.6 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Bidang Perikanan dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	0%	100%	Tidak terukur
	Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	0%	100%	Tidak terukur
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	100,02%	100%	0,02%
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	100,25%	100%	0,25%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	100%	100%	0%

Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	102,62%	100%	2,62%
Rerata Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia				0,72%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki oleh perangkat daerah memiliki rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,72%, hal ini dikarenakan dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran, terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yang tidak dapat terukur, dikarenakan adanya data capaian kinerja belum belum rilis. Adapun tingkat efisiensi sasaran strategis 2 - 4 sebagai berikut, untuk sasaran strategis 2 (dua) yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat untuk indikator Skor PPH konsumsi mengalami efisiensi sebesar 0,02% dengan capaian kinerja sebesar 100,02% sedangkan untuk indikator Skor PPH ketersediaan memiliki efisiensi sebesar 0,25% dengan capaian kinerja sebesar 100,25%; sasaran strategis 3 (tiga) yaitu meningkatnya produksi perikanan dengan indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tidak mengalami efisiensi atau perhitungan tingkat efisiensi 0% dengan capaian kinerja yang didapat sama besar dengan ketercukupan sarana prasarana dan sasaran strategis 4 (empat) yaitu terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif dengan indikator Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah mengalami efisiensi sebesar 2,62% dengan capaian kinerja sebesar 102,62%. Rata-rata capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 100,72% sedangkan tingkat pemenuhan sarana prasarana sebesar 100% berdasarkan dokumen RKBMD (Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah) tahun 2025.

b. Upaya Perbaikan Kinerja

Pada tahun 2025 secara umum sasaran strategis dan sasaran program dapat berjalan sesuai apa yang direncanakan. Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial yang tercantum pada DPA dengan data dilapangan, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah domisili. Adapun alternatif upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial adalah melakukan pergantian penerima sesuai kriteria dan lokasi domisili penerima pertama.

Adapun upaya yang akan dilakukan sebagai alternative perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Beberapa alternative upaya perbaikan untuk mewujudkan **Indikator Kinerja Utama** yaitu **Indeks Ketahanan Pangan** antara lain :

2. Aspek ketersediaan :

- a) Peningkatan penyediaan pangan melalui CPPD, ataupun CPM
- b) Pemanfaatan pekarangan, kebun, lahan tidur ataupun lahan marginal dalam rangka mendukung cadangan pangan “hidup” berbasis sumberdaya pangan lokal (Kebun B2SA – Desa Tematik Ketahanan Pangan)
- c) Optimalisasi penanganan sisa pangan melalui sosialisasi perubahan perilaku ibu rumah tangga mulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan sampai pada penyajiannya untuk keluarga.

3. Aspek keterjangkauan :

- a) Pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP)
- b) Penyaluran bantuan sosial (pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan atau terdampak bencana (alam/sosial)

4. Aspek pemanfaatan :

- a) Pengawasan keamanan pangan segar saat diedarkan dan sebelum diedarkan
- b) Peningkatan prasarana penjaminan keamanan dan mutu pangan segar
- c) Pengembangan industri pangan lokal

Adapun alternative upaya perbaikan untuk mewujudkan **Indikator Kinerja Utama 3** yaitu **Skor PPH konsumsi** antara lain :

- 1. Menyusun Peraturan Daerah terkait ketahanan pangan;
- 2. Meningkatkan publikasi terkait diversifikasi dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- 3. Peningkatan edukasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- 4. Mengoptimalkan instruksi terkait diversifikasi pangan local, melalui snack pangan local “Kaya Pangan”/sejenisnya;

5. Meningkatkan publikasi terkait konsumsi ikan;
6. Meningkatkan jejaring pemasaran produk hasil perikanan;
7. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil perikanan;

Adapun alternative upaya perbaikan untuk mewujudkan **Indikator Kinerja Utama 4** yaitu **Skor PPH ketersediaan** antara lain :

1. Meningkatkan forum koordinasi multisektor dalam upaya peningkatan produksi 9 (sembilan) kelompok pangan yang menjadi parameter pengolahan data;
2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan data lintas sektor;

Sedangkan beberapa alternative untuk mewujudkan **Indikator Kinerja Utama 5 (lima)** yaitu **Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan** antara lain :

1. Meningkatkan Restocking yaitu kegiatan penebaran ikan diperairan umum untuk menjaga pelestarian lingkungan perairan dan meningkatkan produktivitas perairan;
2. Meningkatkan monitoring penyakit ikan dengan cara memberikan fasilitas untuk pengujian sampel air (sebagai media budidaya) maupun ikan kepada POKDAKAN;
3. Pemberian fasilitas hibah sarana usaha perikanan dan perikanan tangkap;
4. Mengoptimalkan sosialisasi penggunaan aplikasi Si Patin Ceria;
5. Mengoptimalkan pelatihan tema CBIB dan CPIB;
6. Mengoptimalkan pendampingan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya;
7. Mengoptimalkan peningkatan kelas kelompok perikanan;

8. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta sebagai bapak asuh sekaligus *off taker* hasil produksi perikanan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025 – 2029 yang berisi tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2025 mencapai target, hal ini didukung dengan 1 (satu) indikator terealisasi sesuai target dan 3 (tiga) indikator terealisasi melebihi target yang telah ditentukan, namun demikian terdapat 2 (dua) belum dapat terukur capaian kinerjanya dikarenakan data belum rilis, seperti yang telah dijelaskan pada Bab III. Sedangkan untuk capaian penyerapan anggaran sebesar 90,30% dari total anggaran sebesar Rp. 9.363.505.416,- terealisasi Rp. 8.455.583.315,-.

Beberapa tindak lanjut dalam pencapaian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang ke depan. Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu), yaitu **Indeks Ketahanan Pangan** antara lain :

1. Aspek ketersediaan :

- a) Peningkatan penyediaan pangan melalui CPPD, ataupun CPM;
- b) Pemanfaatan pekarangan, kebun, lahan tidur ataupun lahan marginal dalam rangka mendukung cadangan pangan “hidup” berbasis sumberdaya pangan lokal;
- c) Optimalisasi penanganan sisa pangan melalui sosialisasi perubahan perilaku ibu rumah tangga mulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan sampai pada penyajiannya untuk keluarga.

2. Aspek keterjangkauan :

- a) Pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP);
- b) Penyaluran bantuan sosial (pangan) bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan atau terdampak bencana (alam/sosial).

3. Aspek pemanfaatan :

- a) Pengawasan keamanan pangan segar saat diedarkan dan sebelum

diedarkan;

- b) Peningkatan prasarana penjaminan keamanan dan mutu pangan segar;
- c) Pengembangan industri pangan lokal.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku semoga bisa menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.